

SILABUS
ETIKA ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Latar Belakang

Mata kuliah ini diajarkan pada program S1 Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM untuk memberikan pemahaman tentang etika terapan dalam organisasi publik. Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dari kuliah ini, yaitu: mengajarkan ketentuan dan prinsip-prinsip etika dalam tugas-tugas administrasi negara, mendiskusikan berbagai masalah moral dan etis yang muncul dalam kebijakan publik dan pelayanan publik, serta memberikan penghayatan tentang kewajiban dan tugas-tugas khusus yang diemban oleh seseorang yang aktif dalam kegiatan organisasi publik.

Etika administrasi negara menjadi semakin penting karena tuntutan akan peran negara yang masih tetap sangat relevan di Indonesia. Dalam banyak literatur, dijelaskan bahwa Indonesia termasuk negara lemah (*weak state*) atau negara lunak (*soft state*). Peran negara ternyata masih gagal dalam menegakkan hukum, menciptakan situasi pasar yang sehat bagi para pelaku bisnis, serta gagal dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Ini terjadi karena pemahaman dan penghayatan akan etika bagi para perumus kebijakan, birokrat, dan pelaksana dalam organisasi publik masih sangat jauh dari harapan. Demokratisasi ternyata tidak serta-merta menjamin kualitas kebijakan dan pelayanan yang baik apabila tidak didukung oleh penerapan etika seperti seharusnya.

Pembahasan etika administrasi negara dapat bersifat normatif maupun deskriptif. Dalam kaitannya dengan praktik perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik, etika administrasi negara membahas banyak kaidah normatif. Namun penyampaian nilai-nilai etis dalam kegiatan administrasi negara juga bisa bersifat deskriptif dengan membahas berbagai kasus nyata dalam hubungan antara pejabat publik dan masyarakat pada umumnya. Maka pembahasan mengenai etika administrasi negara dalam kuliah akan menyangkut nilai-nilai sosial abstrak seperti masalah keadilan, legitimasi politik atau partisipasi masyarakat, hingga perdebatan mengenai nilai-nilai dasar etika penyelenggaraan pelayanan publik seperti tanggungjawab para birokrat terhadap warga masyarakat, peningkatan efisiensi, pelayanan, etos kerja pegawai negeri, dan sebagainya.

Penilaian mahasiswa

Mahasiswa peserta kuliah ini akan dinilai berdasarkan tiga komponen pokok, yaitu:

1. Partisipasi di dalam diskusi kelas
2. Pembuatan tugas dengan studi kasus
3. Ujian / paper.

Selain bahan-bahan diskusi dan literatur yang wajib dibaca dan dipahami, para mahasiswa juga diharapkan menambah bahan rujukan yang dapat diperoleh dari situs web, perpustakaan, serta sumber-sumber lainnya.

Rancangan Kuliah

No.	Topik	Pokok Bahasan	Referensi
1	Pengantar	<ul style="list-style-type: none">• Silabus• Apakah pentingnya etika?• Definisi Etika Administrasi Negara	Zubair, Achmad Kharis, <i>Pengantar Kuliah Etika</i> , Tiara Wacana, 1988 Frankena, William K., <i>Ethics</i> , New Delhi: Prentice Hall, 1982 R. A. Buchholtz & S. B. Rosenthal, <i>Business Ethics</i> , New York: Prentice Hall, 1998
2	Pertimbangan moral	<ul style="list-style-type: none">• Tahap-tahap pertimbangan moral dalam interaksi sosial• Moralisme legal	Moore, F.C.T., <i>The Psychological Basis of Morality</i> , Boston: MacMilan, 1978
3	HAM, Kekuasaan dan Demokrasi	<ul style="list-style-type: none">• Ide-ide besar dalam politik; perdebatan tentang utilitarianisme dan idealisme• Hak azasi manusia• Legitimasi sosiologis vs. legitimasi etis• Demokrasi	John Stuart Mill, <i>Utilitarianism</i> , Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1957 Suseno, Franz Magnis, <i>Etika Politik</i> , Jakarta: Rajawali Press, 1994

No.	Topik	Pokok Bahasan	Referensi
4	Etika dalam sistem ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar bebas dan hak azasi manusia • Utilitas pasar bebas • Teori kelas dan sistem ekonomi 	<p>Sonny Keraf, <i>Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya</i>, Jakarta; Kanisius, 1998</p> <p>Charles Lindblom, <i>Politics and Markets</i>, New York: Basic Books, 1977</p> <p>George Dalton, <i>Economic Systems and Society: Capitalism, Communism, and the Third World</i>, New York: Penguin, 1974</p>
5	Kegagalan pasar dalam perspektif etika	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan sempurna • Pasar monopolis • Persaingan oligopolis • Kebijakan publik dalam pasar oligopolis 	<p>Manuel G. Velasquez, <i>Etika Bisnis: Konsep dan Kasus</i>, Yogyakarta: Andi, 2005</p> <p>Russell Warren, <i>Antitrust Theory and Practice</i>, Columbus: Grid Inc., 1975</p>
6	Masalah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusutan sumberdaya alam • Polusi • Bisnis dan konservasi sumberdaya 	<p>Richard Stephenson, <i>Living with Tomorrow</i>, New York: John Willey & Sons, 1981</p> <p>Lester Brown, <i>State of the World</i>, New York: Norton & Company, 2000</p> <p>Donelia Meadows et al, <i>The Limits to Growth</i>, New York: Universe Books, 1974</p>
7	Ujian Midterm		
8	Konsekuensi moral kebijakan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Gagasan tentang <i>welfare state</i> • Keadilan sosial • Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik 	<p>Dipoyudo, Kirdi, <i>Keadilan Sosial</i>, Jakarta: Rajawali Press, 1982</p> <p>Hill, Michael, <i>The Policy Process in the Modern State</i>, Prentice Hall, London, 1997</p>

No.	Topik	Pokok Bahasan	Referensi
9	Korupsi dan dampak negatifnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian korupsi • Korupsi dalam praktik administrasi negara • Penyebab korupsi dan penanggulangannya 	<p>Kumorotomo, Wahyudi, <i>Etika Administrasi Negara</i>, Jakarta: Rajawali Press, 2004</p> <p>Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa & H. Lindsey Parris, <i>Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah</i>, Yayasan Obor, Jakarta, 2002</p> <p>Alatas, Syed Hussein, <i>Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi</i>, Jakarta: LP3ES, 1987</p>
10	Kaidah transparansi dan kepentingan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Teori tentang transparansi • Kepentingan umum: misi utama organisasi publik • Pelayanan publik 	<p>Rosen, Bernard, <i>Holding Government Bureaucracies Accountable</i>, Boston: Praeger Publishers, 1982</p> <p>Dwiyanto, Agus, <i>Good Governance dalam Pelayanan Publik</i>, Yogyakarta: Gama Press, 2006</p>
11	Pertanggungjawaban dalam birokrasi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pertanggungjawaban secara normatif • Mekanisme kawal danimbang • Akuntabilitas birokrasi publik 	<p>Wahyudi Kumorotomo, <i>Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005</p> <p>Agus Dwiyanto et al, <i>Reformasi Tata-Pemerintahan dan Otonomi Daerah</i>, PSKP-UGM dan PEG-USAID, Yogyakarta, 2003</p>

No.	Topik	Pokok Bahasan	Referensi
12	Kode etik bagi para birokrat	<ul style="list-style-type: none"> • Etika kepegawaian: pegawai dan lembaga publik • Hak intelektual, pengetahuan dan keterampilan • Etos kerja dalam organisasi pemerintah 	Jack Behrman, <i>Essays on Ethics in Business and the Professions</i> , Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988 John A. Rohr, <i>Ethics for Bureaucrats</i> , Marcel Dekker Inc., New York, 1978 Laura Hartman, <i>Perspectives in Business Ethics</i> , Illinois: McGraw-Hill, 2004
13	Ujian Akhir		

Referensi

1. Alatas, Syed Hussein, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987
2. Behrman, Jack, *Essays on Ethics in Business and the Professions*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1988
3. Brown, Lester, *State of the World*, New York: Norton & Company, 2000
4. Dalton, George, *Economic Systems and Society: Capitalism, Communism, and the Third World*, New York: Penguin, 1974
5. Dipoyudo, Kirdi, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1982
6. Dwiyanto, Agus, et al, *Reformasi Tata-Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PSKP-UGM dan PEG-USAID, Yogyakarta, 2003
7. Dwiyanto, Agus, *Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gama Press, 2006
8. Frankena, William K., *Ethics*, New Delhi: Prentice Hall, 1982
9. Hartman, Laura, *Perspectives in Business Ethics*, Illinois: McGraw-Hill, 2004
10. Hill, Michael, *The Policy Process in the Modern State*, Prentice Hall, London, 1997
11. Keraf, Sonny, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Jakarta: Kanisius, 1998
12. Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa & H. Lindsey Parris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor, Jakarta, 2002
13. Kumorotomo, Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
14. Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
15. Meadows, Donelia, et al, *The Limits to Growth*, New York: Universe Books, 1974
16. Mill, John Stuart, *Utilitarianism*, Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1957

17. Moore, F.C.T., *The Psychological Basis of Morality*, Boston: MacMilan, 1978
18. Buchholtz, R.A., & S. B. Rosenthal, *Business Ethics*, New York: Prentice Hall, 1998
19. Rohr, John, *Ethics for Bureaucrats*, Marcel Dekker Inc., New York, 1978
20. Rosen, Bernard, *Holding Government Bureaucracies Accountable*, Boston: Praeger Publishers, 1982
21. Stephenson, Richard, *Living with Tommorrow*, New York: John Willey & Sons, 1981
22. Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1994
23. Velasquez, Manuel G., *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*, Yogyakarta: Andi, 2005
24. Warren, Russell, *Antitrust Theory and Practice*, Columbus: Grid Inc., 1975
25. Zubair, Achmad Kharis, *Pengantar Kuliah Etika*, Tiara Wacana, 1988
